

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 147/HK.01.01/K.JB/07/2022
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
 - e. Bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas pemilihan Umum Kecamatan;

- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan tim pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standart Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara

Republik Tahun 2019 Nomor 692);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA BARAT.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
 - b. Pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
 - c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu bulan; dan
 - f. Penyampaian laporan setiap tahun di Bulan Desember kepada pusat JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat;
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal : 04 Juli 2022

KETUA,

ABDULLAH, S.TP.

Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 147/HK.01.01/K.JB/07/2022
TANGGAL : 04 Juli 2022

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ABDULLAH, S.TP	KETUA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PEMBINA
2.	Drs. HARMINUS KOTO, M.I.Kom.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PEMBINA
3.	YULIANTO, S.H.,M.H.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PEMBINA
4.	SUTARNO, S.H.,M.H.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PEMBINA
5.	Drs. H.M. WASIKIN MARZUKI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PEMBINA
6.	YUSUP KURNIA, S.IP.,S.H.,M.H.	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PEMBINA
7.	ZAKI HILMI	ANGGOTA BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PEMBINA
8.	Drs. ELIAZAR BARUS, M.Si.	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PENANGGUNG JAWAB
9.	ANGGA N NUGRAHA	KEPALA BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	KETUA
10.	INDIRA SARASWATI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	ANGGOTA
11.	IRFAN PATUROHMAN	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	ANGGOTA

12.	BILLY ADAM FISHER	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	ANGGOTA
13.	LATIFATUL QOLBI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	ANGGOTA
14.	FADHILA FITRIYADI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	ANGGOTA
15.	DWI ASTUTI HANDAYANI	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	ANGGOTA
16.	IDE MADYA	STAF BAGIAN HUKUM, HUMAS, DAN DATA INFORMASI BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	ANGGOTA

KETUA,



ABDULLAH, S.TP